

ISLAM KEBANGSAAN INKLUSIF FORMULASI GAGASAN ISLAM RAHMAT LIL 'ALAMIN DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

M. Sa'ad Alfanny

salafterampil@gmail.com

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Kamal Yusuf

kamalinev@gmail.com

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Fathonah K. Daud

fathkasuwi@gmail.com

Universitas Al-Hikmah Tuban, Indonesia

Abstract

The era of globalisation has changed the way Indonesian society perceives the relationship between Islam and nationality. The flow of global information has expanded intercultural interactions but has also given rise to political polarisation, digital tribalism, and a crisis of social tolerance. This study, through a descriptive-reflective approach, seeks to reformulate the relevance of integrating the Islamic value of *Rahmatan li al-'Ālamīn* and the spirit of *Bhinneka Tunggal Ika* as an ethical paradigm in responding to the challenges of contemporary plurality. The results of the study gave birth to the concept of Inclusive National Islam, a religious paradigm that places compassion, justice, and universal humanity at the core of national morality. In socio-political practice, this idea is realised through a movement of religious moderation and the development of an ecosystem of moderation that fosters dialogue, critical reflection, and national solidarity. Thus, Inclusive National Islam is not only a conceptual offering but also a practical model that strengthens social cohesion and reinforces Indonesian civilisation rooted in Islamic spirituality and the spirit of diversity.

Keyword: Plurality, Inclusive National Islam, *Rahmatan li al-'Ālamīn*, Unity in Diversity.



Jurnal Panangkaran disebarluaskan di bawah ketentuan [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](#)

Abstrak

Era globalisasi telah mengubah cara masyarakat Indonesia memaknai relasi antara keislaman dan kebangsaan. Arus informasi global memperluas interaksi antarbudaya namun juga memunculkan polarisasi politik, *digital tribalism*, dan krisis toleransi sosial. Penelitian ini melalui pendekatan deskriptif-reflektif berupaya mereformulasi relevansi integrasi nilai Islam *Rahmatan li al-Ālamīn* dan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai paradigma etis dalam merespons tantangan pluralitas kontemporer. Hasil kajian melahirkan konsep Islam Kebangsaan Inklusif, yaitu paradigma keagamaan yang menempatkan kasih sayang, keadilan, dan kemanusiaan universal sebagai inti moral kebangsaan. Dalam praksis sosial-politik, gagasan ini diwujudkan melalui gerakan moderasi beragama dan pembangunan *ecosystem of moderation* yang menumbuhkan dialog, refleksi kritis, serta solidaritas nasional. Dengan demikian, Islam Kebangsaan Inklusif tidak hanya menjadi tawaran konseptual, tetapi juga model praksis yang memperkuat kohesi sosial dan meneguhkan peradaban Indonesia yang berakar pada spiritualitas Islam dan semangat kebinekaan.

Kata kunci: Pluralitas, Islam Kebangsaan Inklusif, *Rahmatan li al-Ālamīn*, Bhinneka Tunggal Ika.

I. PENDAHULUAN

Keberagaman merupakan keniscayaan yang menjadi ciri hakiki kehidupan manusia dan bagian dari kehendak Allah Subhānahu wa Ta‘ālā dalam proses penciptaan. Prinsip ketetapan ilahi ini secara nyata tercermin dalam kehidupan bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai unsur sosial, budaya, dan keagamaan.(Alfanny & Sirojuddin, 2025) Keberagaman tersebut tidak hanya mencakup aspek kepercayaan dan spiritualitas, tetapi juga bahasa, adat istiadat, suku, serta ras, yang berpadu membentuk mozaik kebangsaan khas Indonesia. Kondisi geografis kepulauan turut memperkaya heterogenitas budaya tersebut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling plural di dunia. Dalam konteks inilah, pluralitas bukan sekadar fakta sosiologis, melainkan manifestasi dari kehendak ilahi yang mengandung nilai edukatif dan spiritual bagi kehidupan berbangsa.

Namun, realitas pluralitas di Indonesia tidak selalu berjalan harmonis. Di satu sisi, Indonesia dikenal sebagai bangsa toleran dengan tradisi keagamaan yang moderat; tetapi di sisi lain, berbagai peristiwa kekerasan yang berlatar agama dan meningkatnya politik identitas menunjukkan adanya krisis dalam menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan universal agama.(Khoirunnisa, 2023) Berdasarkan *Global Terrorism Index (GTI)* 2025 yang mencatat data tahun 2024, Indonesia menempati peringkat ke-30 dari 163 negara

dengan skor 4,17, menandakan masih adanya kerentanan sosial akibat penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik dan ideologis.(Antara, 2025) Fenomena ini mengindikasikan bahwa pesan Islam sebagai agama rahmah belum sepenuhnya terimplementasi dalam praksis sosial keagamaan di Indonesia.

Ambiguitas fungsi agama dalam kehidupan sosial semakin memperjelas persoalan tersebut. Agama yang sejatinya berfungsi sebagai sumber nilai moral dan spiritualitas publik, justru terkadang dihadirkan dalam bentuk eksklusif dan konfrontatif. Pola keberagamaan yang kaku dan fanatisme kelompok menggeser agama dari perannya sebagai perekat sosial menjadi sumber legitimasi perpecahan. Akar masalahnya tidak semata terletak pada perbedaan identitas, melainkan pada cara memaknai perbedaan itu sendiri.(Toha & Muna, 2022) Pola pikir eksklusif dan klaim kebenaran absolut menumbuhkan segregasi sosial yang bertentangan dengan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*. Akibatnya, nilai-nilai toleransi, empati sosial, dan kesadaran kebangsaan perlaha tergerus oleh kepentingan ideologis dan sektarianisme.

Dalam konteks inilah, menurunnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya rasa memiliki terhadap tanah air menjadi gejala krisis identitas kebangsaan. Solidaritas nasional yang semestinya menjadi energi pemersatu justru terfragmentasi oleh kepentingan pragmatis dan politik identitas.(Khoirunnisa, 2023) Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya reorientasi nilai yakni dengan mengembalikan Islam pada ruh universalnya sebagai *Rahmatan li al-‘Ālamīn* yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan lintas batas. Pendekatan ini dapat menjadi fondasi etis bagi pembentukan paradigma kebangsaan yang lebih adaptif, humanis, dan inklusif, di mana perbedaan dipahami bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai potensi konstruktif dalam membangun peradaban bangsa.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian terdahulu oleh Alfan dkk. (2025) dalam *Jurnal Mozaic* berjudul “*Konsep Pluralitas di Indonesia: Menelisik Relasi Islam Rahmat li al-‘Ālamīn dan Bhinneka Tunggal Ika*” menegaskan adanya harmoni antara nilai-nilai keislaman dan ideologi kebangsaan dalam memperkuat pluralitas di Indonesia. Kajian tersebut menyoroti sinergi antara prinsip *Rahmatan li al-‘Ālamīn* dan semboyan nasional *Bhinneka Tunggal Ika* dalam konteks sosial dan ideologis bangsa, yang bersama-sama menumbuhkan semangat persatuan, toleransi, dan keadilan sosial.(Alfanny et al., 2025)

Namun, penelitian ini berupaya melangkah melampaui batas kajian normatif yang sekadar menyoroti relasi teoretis antara nilai keislaman dan ideologi

kebangsaan.(Alfanny et al., 2025) Fokus analisis diarahkan pada upaya merumuskan suatu kerangka konseptual yang lebih dinamis, yang menempatkan nilai *Rahmatan li al-‘Ālamīn* dan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai landasan epistemik bagi konstruksi wacana kebangsaan di era kontemporer. Formulasi ini dimaksudkan bukan hanya untuk menegaskan kompatibilitas antara Islam dan nasionalisme Indonesia, tetapi juga untuk menawarkan paradigma alternatif dalam merespons krisis toleransi, disintegrasi sosial, dan fragmentasi ideologis yang mengancam keutuhan bangsa. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada tataran ideal konseptual, melainkan berupaya menggagas arah baru bagi revitalisasi etika kebangsaan yang berakar pada spiritualitas Islam dan semangat pluralisme Indonesia di era kontemporer.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bersifat interpretatif.(Lexy, 2021) Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna-makna mendalam di balik dinamika sosial dan religius yang membentuk wajah pluralitas di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya berupaya memotret realitas keberagaman yang terjadi, tetapi juga menafsirkan nilai-nilai filosofis yang melandasinya dalam perspektif Islam. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka (*library research*), melalui telaah terhadap berbagai sumber ilmiah seperti artikel jurnal, buku, hasil penelitian, serta data resmi yang relevan dengan tema pluralitas dan keislaman. (Lexy, 2021) Analisis data diarahkan pada upaya memahami interaksi antara nilai-nilai Islam yang bersifat *rahmatan lil ‘alamin* dengan konsep kebinekaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Melalui pendekatan reflektif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang bagaimana ajaran Islam berkontribusi dalam memperkuat semangat kebangsaan dan memperluas horizon pluralitas yang harmonis dalam masyarakat Indonesia yang semakin multicultural di era kontemporer.

III. PEMBAHASAN

1. Dinamika Wacana Kebangsaan dan Tantangan Pluralitas di Era Kontemporer

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap cara masyarakat Indonesia memaknai identitas kebangsaan dan keislaman. Arus informasi yang melintas batas

geografis memperluas ruang interaksi antarbudaya sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi integrasi nasional.(Affan, 2021) Nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi fondasi moral dan sosial bangsa perlahan terdesak oleh dominasi budaya global yang bersifat pragmatis dan individualistik. Dalam konteks ini, Islam dan nasionalisme Indonesia kerap dihadapkan pada dilema antara mempertahankan keaslian tradisi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Globalisasi, di satu sisi, membuka peluang bagi umat Islam Indonesia untuk memperkuat peran mereka dalam percaturan dunia, namun di sisi lain, juga melahirkan kecenderungan penyeragaman pemikiran dan melemahnya kesadaran terhadap keunikan Islam yang berakar pada nilai-nilai Nusantara.(Aryani et al., 2025)

Menurut konteks kehidupan kebangsaan kontemporer, polarisasi politik yang diperkuat oleh peran media digital telah memperdalam fragmentasi identitas sosial dan keagamaan di Indonesia. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi arena pertarungan ideologi, tafsir keagamaan, dan klaim kebenaran yang kerap dimanipulasi untuk kepentingan politik praktis.(Laudya et al., 2025) Banyak pihak menggunakan simbol-simbol keagamaan sebagai alat legitimasi kekuasaan, sehingga wacana keislaman dan kebangsaan sering kali tereduksi menjadi sekadar instrumen politik identitas. Fenomena ini melahirkan ketegangan antara dua orientasi besar, mereka yang menafsirkan Islam secara eksklusif dan menjadikannya sebagai batas identitas kelompok, serta mereka yang memandang Islam sebagai kekuatan moral yang inklusif dan selaras dengan semangat kebangsaan Indonesia.(Supandi & Puspitasari, 2024)

Kondisi tersebut diperburuk oleh munculnya fenomena *echo chamber* dan *digital tribalism*, dua istilah yang menggambarkan efek sosial dari algoritma media digital. Menurut laporan *Pew Research Center* (2023), *echo chamber* merujuk pada ruang digital di mana pengguna hanya terpapar pada informasi dan pandangan yang sejalan dengan keyakinannya sendiri, sementara pandangan berbeda disaring atau diabaikan. Hal ini menyebabkan kurangnya kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis dan berdialog lintas perspektif.(Salman Shiddiq & Misra Misra, 2025) Adapun *digital tribalism* menggambarkan kecenderungan individu untuk membentuk “suku digital” atau kelompok daring yang bersatu berdasarkan kesamaan pandangan ideologis atau identitas keagamaan, yang sering kali disertai permusuhan terhadap kelompok lain (Zafrilla, 2022). Dalam konteks Indonesia, fenomena ini dapat dilihat dari meningkatnya ujaran

kebencian dan polarisasi keagamaan di media sosial, terutama menjelang peristiwa politik seperti pemilu. Sehingga rekontekstualisasi nilai *Rahmatan li al-‘Ālamīn* dan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi sangat urgen sebagai landasan etis dan moral untuk membangun kesadaran kebangsaan yang terbuka, dialogis, serta berkeadaban di tengah derasnya arus digitalisasi global.

Integrasi nilai *Islam Rahmatan lil ‘Ālamīn* dan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam ranah kebijakan publik menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan kebangsaan di era kontemporer. Keduanya memiliki potensi besar sebagai fondasi moral dan filosofis dalam membangun tata kelola sosial yang adil, inklusif, serta menghargai perbedaan.(Alfanny et al., 2025) Dalam konteks kebijakan publik, prinsip *Rahmatan lil ‘Ālamīn* menekankan keadilan sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* yang menegaskan pentingnya persatuan di tengah keragaman. Implementasi konkritnya dapat terlihat dalam kebijakan yang mendorong pemerataan pendidikan, keadilan ekonomi, serta ruang partisipasi sosial-politik bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang agama atau etnis. Dengan demikian, integrasi nilai ini bukan sekadar simbol normatif, melainkan menjadi prinsip operasional dalam pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.(Toha & Muna, 2022)

Pada ranah pendidikan dan moderasi beragama, sinergi kedua nilai tersebut berperan strategis dalam membentuk karakter bangsa yang toleran dan berkeadaban. Pendidikan multikultural yang diilhami oleh spirit *Rahmatan lil ‘Ālamīn* dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan kesadaran bahwa keberagaman merupakan bagian dari kehendak Ilahi, bukan ancaman bagi kesatuan. Melalui kurikulum yang inklusif, peserta didik diajak memahami nilai kemanusiaan universal dalam ajaran Islam serta relevansinya dengan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai identitas kebangsaan.(Aryani et al., 2025) Sementara itu, moderasi beragama menjadi langkah praksis yang menjembatani antara idealisme keagamaan dan realitas sosial. Integrasi ini menumbuhkan orientasi keberagamaan yang dialogis, kontekstual, dan solutif terhadap problem kebangsaan.

Penting untuk menegaskan bahwa pendidikan dan moderasi beragama bukan hanya instrumen pedagogis, tetapi juga arena strategis untuk merawat kesadaran kebangsaan yang berakar pada nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Integrasi Islam *Rahmatan li al-‘Ālamīn* dan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam sistem pendidikan nasional

harus dimaknai sebagai upaya membangun *civic virtue* yakni karakter kewarga-an yang menjunjung tinggi keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial.(Sumarto, 2021) Di tengah menguatnya disrupsi digital, penetrasi ideologi transnasional, serta krisis kepercayaan publik terhadap institusi sosial, pendidikan berparadigma rahmatan tidak cukup berhenti pada transfer kognitif, tetapi harus menumbuhkan *transformative awareness* yang mendorong peserta didik untuk menjadi agen perdamaian dan rekonsiliasi sosial. Pendekatan ini meneguhkan bahwa keislaman dan kebangsaan bukanlah dua entitas yang berhadap-hadapan, melainkan dua dimensi nilai yang saling menguatkan dalam membentuk etika publik dan kepribadian bangsa.(Alfanny et al., 2025)

Moderasi dalam segala aspek sebagai praksis sosial-politik merupakan kunci dalam menghadapi kompleksitas pluralitas Indonesia di era kontemporer. Ia berfungsi sebagai mekanisme penyaring terhadap narasi ekstremisme, intoleransi, dan reduksionisme identitas yang kerap memecah belah masyarakat. Dalam konteks ini, negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil perlu membangun *ecosystem of moderation*—ekosistem kebangsaan yang menumbuhkan budaya dialog, refleksi kritis, dan kolaborasi lintas iman. (Faiqah & Pransiska, 2018) Upaya ini sejalan dengan mandat moral Islam *Rahmatan li al-‘Ālamīn* yang menempatkan kasih sayang dan keadilan sebagai prinsip universal, serta semangat *Bhinneka Tunggal Ika* yang menegaskan kesatuan dalam keberagaman. Dengan demikian, reorientasi wacana kebangsaan di era globalisasi harus diarahkan pada penguatan *civic religiosity*—yakni religiusitas yang menumbuhkan rasa kebangsaan dan kemanusiaan universal.(Aryani et al., 2025) Hanya melalui sinergi inilah Indonesia dapat menghadirkan model peradaban yang tidak sekadar berkeadaban secara spiritual, tetapi juga berdaya saing secara global dan berkeadilan secara sosial.

2. Formulasi Konseptual Islam *Rahmatan li al-‘Ālamīn* sebagai Etika Kebangsaan

Formulasi konseptual *Islam Rahmatan li al-‘Ālamīn* sebagai etika kebangsaan menempatkan ajaran Islam pada posisi yang lebih luas dari sekadar sistem keimanan individual menuju orientasi moral yang membimbing kehidupan sosial dan kenegaraan. Dalam konteks ini, makna *rahmah* tidak hanya dimaknai sebagai kasih sayang spiritual, tetapi juga sebagai prinsip keadilan sosial, solidaritas kemanusiaan, dan tanggung jawab kolektif terhadap sesama warga bangsa.(Annisa Rahmah et al., 2024) Islam yang berlandaskan *rahmah* mengajarkan bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan

ruang untuk saling melengkapi dan meneguhkan kemaslahatan bersama. Ketika prinsip ini diterjemahkan dalam konteks kebangsaan, ia menjadi etika publik yang mengarahkan umat Islam untuk berkontribusi aktif dalam menciptakan harmoni sosial, menjaga keutuhan negara, dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan universal yang sejalan dengan konstitusi serta falsafah Pancasila. Gagasan tentang *Rahmatan li al-‘Ālamīn* tidak berhenti sebagai semboyan normatif, tetapi hadir sebagai pandangan hidup yang menuntun umat untuk menjadi rahmat bagi seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Islam sebagai *Rahmatan li al-‘Ālamīn* sebagai paradigma etis juga menuntut reinterpretasi terhadap relasi antara agama dan negara dalam kerangka masyarakat plural di masa kontemporer.(Annisa Rahmah et al., 2024) Prinsip ini mengajarkan keseimbangan antara pengamalan nilai-nilai keagamaan dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Dalam konteks kebijakan sosial, nilai *rahmah* mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang berpihak pada keadilan, kesejahteraan, serta penghargaan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi. Ia menjadi energi moral untuk menolak segala bentuk kekerasan, intoleransi, dan hegemoni ideologis yang mengancam harmoni nasional. Dengan demikian, *Islam Rahmatan li al-‘Ālamīn* dapat dipahami sebagai etika kebangsaan progresif yang mendorong terwujudnya masyarakat madani yang adil, inklusif, dan berkeadaban; di mana agama bukan instrumen kekuasaan, melainkan sumber inspirasi moral dalam membangun peradaban kebangsaan yang damai dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Dalam berbagai pandangan para pemikir Muslim Indonesia seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Quraish Shihab memberikan fondasi intelektual yang kuat bagi pengembangan wacana Islam yang berorientasi pada peradaban damai. Nurcholish Madjid menekankan pentingnya sekularisasi dalam arti pemurnian nilai-nilai agama dari kepentingan politik praktis. Baginya, Islam sejati adalah agama moral yang mendorong pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan, baik politik, sosial, maupun kultural. Dengan gagasan *Islam yes, partai Islam no*, ia mengusulkan bentuk keislaman yang terbuka dan kompatibel dengan prinsip demokrasi, pluralisme, serta kemajuan modern.(Muhammad Nur Ilham et al., 2024) Melalui pemikiran ini, Cak Nur berusaha menampilkan wajah Islam yang rasional, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia—suatu pandangan yang sejalan dengan misi *Rahmatan li al-‘Ālamīn* dalam konteks kehidupan berbangsa.

Sementara itu, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengembangkan konsep *pribumisasi Islam* sebagai pendekatan sosial-kultural untuk menjembatani ajaran Islam dengan tradisi lokal Indonesia. Bagi Gus Dur, Islam tidak boleh hadir sebagai kekuatan hegemonik yang menghapus keragaman budaya, tetapi sebagai inspirasi moral yang menumbuhkan toleransi dan penghormatan terhadap pluralitas.(Syaputra & Marza, 2025) Pandangannya tentang demokrasi dan hak asasi manusia menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dan kemanusiaan universal dapat berjalan beriringan.

Sementara itu, Quraish Shihab menegaskan pentingnya memahami al-Qur'an melalui pendekatan kontekstual yang menyoroti dimensi kemanusiaan, kedamaian, dan keadilan sosial sebagai ruh ajaran Islam. Dalam berbagai karya tafsirnya, seperti *Tafsir al-Mishbah*, ia menafsirkan ayat-ayat pluralitas—misalnya Q.S. al-Hujurāt [49]:13 tentang penciptaan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku—sebagai pesan ilahi bahwa keberagaman merupakan kehendak Tuhan, bukan ancaman bagi kesatuan umat. Bagi Quraish Shihab, perbedaan agama, budaya, dan pandangan hidup harus dipandang sebagai ruang dialog dan kerja sama kemanusiaan, bukan sumber permusuhan.(Shihab, 2002)

Melalui penafsiran yang inklusif ini, Quraish Shihab berusaha menggeser cara pandang umat dari eksklusivisme menuju kesadaran universal tentang nilai *Rahmatan li al-‘Ālamīn*. Islam, menurutnya, bukanlah sistem yang membatasi, melainkan jalan hidup yang membebaskan dan menumbuhkan kemaslahatan bagi seluruh ciptaan.(Shihab, 2002) Pandangan ini melengkapi gagasan Nurcholish Madjid tentang Islam yang rasional dan Gus Dur tentang Islam yang membumi, sehingga ketiganya berpadu membentuk paradigma Islam yang menumbuhkan kedamaian, menjunjung pluralitas, serta berperan aktif dalam membangun tatanan kebangsaan yang adil dan berkeadaban.

Nilai-nilai *rahmah* (kasih sayang), ‘*adl* (keadilan), dan kemanusiaan universal yang melekat dalam ajaran Islam memiliki makna strategis dalam konteks pembentukan wacana kebangsaan kontemporer di Indonesia. Prinsip *Rahmatan li al-‘Ālamīn* sejatinya menawarkan etika sosial yang melampaui sekat teologis dan ideologis, menegaskan bahwa Islam hadir sebagai kekuatan moral yang memelihara harmoni antara manusia dengan Tuhan sekaligus antar-sesama manusia.(Alfanny & Sirojuddin, 2025) Dalam bingkai kebangsaan yang berlandaskan *Bhinneka Tunggal Ika*, nilai kasih sayang dapat menjadi fondasi etis untuk membangun empati sosial, solidaritas lintas identitas, dan penghargaan terhadap perbedaan. Melalui spirit ini, Islam tidak hanya menjadi identitas

keagamaan, tetapi juga kekuatan integratif yang menyatukan keanekaragaman Indonesia dalam satu komitmen kebangsaan yang humanis dan berkeadaban.

Paradigma *Islam Kebangsaan Inklusif* dapat dipahami sebagai fondasi konseptual yang selaras dengan gagasan *ecosystem of moderation* dalam praksis sosial-politik kontemporer. Keduanya sama-sama menegaskan pentingnya menempatkan nilai kasih sayang, keadilan, dan kemanusiaan universal sebagai pilar dalam merawat kehidupan kebangsaan yang plural dan berkeadaban. Jika *Islam Kebangsaan Inklusif* menekankan dimensi etis-filosofis dari ajaran Islam sebagai basis moral publik yang melampaui sekat keagamaan dan kultural, maka *moderasi beragama* berfungsi sebagai instrumen praksis yang menerjemahkan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan, pendidikan, dan interaksi sosial sehari-hari.(Muvid, 2025) Dalam konteks inilah, keduanya berpadu membentuk satu kesatuan paradigma kebangsaan yang tidak hanya normatif, tetapi juga transformatif—yakni mampu merespons dinamika globalisasi, krisis identitas, dan polarisasi sosial dengan pendekatan yang humanis dan berkeadilan.

Paradigma ini menuntun pada reorientasi wacana kebangsaan yang lebih visioner, di mana keislaman tidak berhenti pada simbol dan ritual, tetapi bertransformasi menjadi energi moral yang menggerakkan solidaritas lintas identitas. *Islam Kebangsaan Inklusif* memperkuat fungsi *moderasi beragama* sebagai benteng kultural terhadap ekstremisme, sekaligus sebagai sarana untuk memperkuat *civic religiosity*—yakni ekspresi keberagamaan yang meneguhkan nilai kemanusiaan universal dalam kerangka kebangsaan Indonesia.(Kusuma et al., 2022) Dalam lanskap global yang ditandai oleh kompetisi ideologi, ekonomi, dan teknologi, integrasi dua paradigma ini menghadirkan model peradaban yang menyeimbangkan spiritualitas dan rasionalitas, tradisi dan kemajuan.

3. Sinergi Nilai *Bhinneka Tunggal Ika* dan *Rahmatan li al-‘Ālamīn* dalam Reorientasi Wacana Kebangsaan

Mengidentifikasi titik temu antara *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai dasar ideologis bangsa dan *Rahmatan li al-‘Ālamīn* sebagai landasan spiritual universal merupakan upaya untuk memahami bagaimana nilai-nilai kebangsaan dan keislaman dapat saling menguatkan dalam membangun harmoni sosial di Indonesia. *Bhinneka Tunggal Ika* menegaskan prinsip persatuan dalam keberagaman sebagai fondasi kehidupan berbangsa, sedangkan *Rahmatan li al-‘Ālamīn* menegaskan misi Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan agama, etnis, maupun budaya.(Alfanny et al.,

2025) Kedua konsep ini sejatinya memiliki kesamaan visi: menciptakan kehidupan yang damai, adil, dan saling menghormati. Jika *Bhinneka Tunggal Ika* berfungsi sebagai bingkai ideologis yang menjaga kesatuan bangsa, maka *Rahmatan li al-'Ālamīn* menjadi kekuatan moral dan spiritual yang menghidupkan nilai kemanusiaan di dalamnya. Sinergi antara keduanya menghadirkan paradigma kebangsaan yang berakar pada nilai-nilai transendental, tetapi tetap responsif terhadap realitas sosial yang plural.(Muvid, 2025)

Dalam konteks pemikiran Islam Indonesia, titik temu ini dapat dipahami melalui gagasan para ulama seperti KH. Maimoen Zubair yang menekankan bahwa cinta tanah air (*hubb al-waṭan*) merupakan bagian integral dari keimanan. Bagi beliau, menjaga keutuhan negara dan menghormati keragaman adalah bentuk pengamalan nyata dari prinsip *Rahmatan li al-'Ālamīn*. Mbah Moen memandang bahwa Indonesia sebagai negara majemuk telah menemukan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kebangsaan melalui *Bhinneka Tunggal Ika*. Ia menolak pandangan dikotomis yang memisahkan Islam dari nasionalisme, karena keduanya dapat berjalan seiring dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban. KH. Maimoen Zubair melihat bahwa pluralitas bangsa Indonesia adalah sunnatullah — ketentuan Ilahi yang harus diterima dengan penuh kebijaksanaan. (Alfanny et al., 2025) Oleh karena itu, Islam di Indonesia tidak boleh hadir dalam wajah eksklusif atau konfrontatif, melainkan harus menjadi kekuatan moral yang menuntun masyarakat menuju kedamaian dan persatuan.

Integrasi nilai *Bhinneka Tunggal Ika* dan *Rahmatan li al-'Ālamīn* dalam kebijakan publik menjadi wujud konkret sinergi antara ideologi kebangsaan dan spiritualitas Islam. Kedua nilai ini dapat dijadikan dasar etika pemerintahan yang menekankan keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks kebijakan, semangat *Bhinneka Tunggal Ika* memastikan bahwa setiap keputusan publik berpihak pada persatuan dan penghormatan terhadap keragaman, sementara prinsip *Rahmatan li al-'Ālamīn* menuntun arah kebijakan agar berorientasi pada kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab moral terhadap seluruh rakyat tanpa diskriminasi.(Kusuma et al., 2022) Ketika nilai-nilai ini diinternalisasi dalam birokrasi, hukum, dan tata kelola pemerintahan, maka negara tidak hanya hadir sebagai entitas politik, tetapi juga sebagai institusi yang memanifestasikan nilai kemanusiaan universal yang berakar pada spiritualitas dan moralitas.

Sementara itu, dalam ranah pendidikan multikultural dan moderasi beragama di era kontemporer, integrasi nilai *Rahmatan li al-'Ālamīn* dan *Bhinneka Tunggal Ika*

berfungsi bukan hanya sebagai landasan moral, tetapi juga sebagai solusi strategis terhadap krisis identitas dan polarisasi sosial akibat derasnya arus globalisasi. Pendidikan berbasis nilai-nilai ini menuntut adanya reorientasi paradigma belajar—dari sekadar transfer pengetahuan menuju pembentukan kesadaran kritis dan empati sosial. Dalam konteks ini, nilai kasih sayang dan kemanusiaan universal Islam menjadi fondasi untuk menumbuhkan *global citizenship*, yaitu warga bangsa yang berpikir terbuka namun berakar kuat pada nilai-nilai lokal dan spiritual.(Annisa Rahmah et al., 2024) Dengan demikian, pendidikan tidak hanya melahirkan individu cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, bijak dalam beragama, serta mampu berinteraksi secara damai di tengah keragaman global.

Sebagai langkah konkret penguatan kurikulum moderasi beragama dan pendidikan multikultural perlu dipadukan dengan inovasi pedagogis yang relevan dengan zaman. Program lintas budaya, pelatihan literasi digital etis, dan forum dialog lintas iman di sekolah maupun kampus dapat menjadi ruang praksis bagi internalisasi nilai *Rahmatan li al-‘Ālamīn* dan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sipil penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendorong toleransi aktif dan tanggung jawab sosial.(Aryani et al., 2025) Dengan memperkuat ruang-ruang pendidikan ini, bangsa Indonesia dapat menghadirkan model peradaban yang harmonis dan resilien—yakni peradaban yang mampu menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitas kebangsaannya maupun spirit kemanusiaannya.

Menurut konteks krisis toleransi dan tantangan pluralitas bangsa di era modern, diperlukan formulasi konseptual baru yang mampu merangkul dimensi kebangsaan dan spiritualitas Islam dalam satu kerangka etis yang utuh. Dari titik temu antara Bhinneka Tunggal Ika dan *Rahmatan li al-‘Ālamīn*, dapat ditawarkan model konseptual yang disebut Islam Kebangsaan Inklusif—sebuah paradigma yang menempatkan nilai-nilai Islam sebagai kekuatan moral yang memperkokoh keindonesiaan, bukan menegasikan atau menyainginya. Islam Kebangsaan Inklusif berpijak pada prinsip bahwa keberagaman bukan ancaman bagi keimanan, melainkan ruang untuk mewujudkan kasih sayang Tuhan melalui tindakan sosial yang adil dan beradab. Model ini mendorong umat Islam untuk menjadi agen perdamaian dan keadilan sosial dalam kerangka negara-bangsa, dengan menginternalisasi semangat kebangsaan yang berpihak pada kemanusiaan universal.(Kusuma et al., 2022) Dengan demikian, Islam tidak hanya hadir sebagai sistem

teologis, tetapi juga sebagai etika sosial yang menumbuhkan harmoni, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif terhadap sesama warga bangsa.

Reorientasi wacana kebangsaan menjadi kebutuhan epistemologis sekaligus moral di tengah krisis toleransi dan disorientasi identitas akibat globalisasi. Dalam konteks ini, Islam Kebangsaan Inklusif hadir sebagai paradigma pembaruan yang berupaya meneguhkan kembali fondasi etik bangsa dengan menjembatani dua kutub besar yang sering dipertentangkan, iman dan kemanusiaan, spiritualitas dan nasionalisme. Reorientasi ini menolak kebangsaan yang berhenti pada simbolisme dan retorika, serta menawarkan bentuk kebangsaan yang berjiwa rahmat—di mana cinta tanah air dimaknai sebagai tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan dan menghormati keberagaman. Dengan demikian, kebangsaan tidak lagi dipahami sekadar sebagai kontrak sosial-politik, tetapi sebagai kesadaran etik-transendental yang menghubungkan manusia, Tuhan, dan tanah air dalam horizon kemanusiaan universal.(Alfanny et al., 2025)

Islam Kebangsaan Inklusif mengusulkan reposisi wacana kebangsaan sebagai ruang artikulasi nilai-nilai keislaman yang konstruktif terhadap publik, bukan sebagai instrumen eksklusivisme identitas. Dalam praksisnya, reorientasi ini meniscayakan transformasi kebijakan publik yang berpihak pada kemaslahatan universal, penguatan pendidikan kebangsaan yang menumbuhkan empati lintas iman, serta revitalisasi ruang sosial yang egaliter dan dialogis. Melalui kerangka ini, Islam tampil bukan sebagai kekuatan ideologis yang memisahkan, melainkan sebagai daya spiritual yang merekatkan—menyemai kasih sayang, menegakkan keadilan, dan membangun solidaritas kemanusiaan di tengah disrupti global. Dengan demikian, reorientasi wacana kebangsaan berbasis *Islam Kebangsaan Inklusif* menjadi langkah strategis untuk membangun peradaban Indonesia yang berakar pada nilai ilahiah, namun berwawasan cosmopolitan, di mana nasionalisme dan spiritualitas bertemu dalam satu dialektika etik yang membebaskan.

IV. KESIMPULAN

Paradigma *Islam Kebangsaan Inklusif* menegaskan bahwa keislaman dan kebangsaan bukanlah dua kutub yang berseberangan, melainkan dua arus nilai yang saling melengkapi dalam membangun tatanan sosial yang berkeadilan, beradab, dan inklusif.

Integrasi antara spirit *Rahmatan li al-Ālamīn* dan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* melahirkan fondasi etik dan spiritual yang mampu menjawab kompleksitas pluralitas serta polarisasi identitas di era globalisasi dengan pendekatan dialogis, empatik, dan humanis. Dalam bingkai ini, Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem keimanan yang transendental, tetapi juga sebagai kekuatan moral publik yang menegakkan keadilan sosial, melindungi kelompok rentan, dan menumbuhkan rasa persaudaraan lintas agama, etnis, serta budaya. Konsepsi ini menemukan relevansinya melalui praksis moderasi beragama yang memadukan nilai-nilai kemaslahatan dan kebangsaan sebagai satu kesatuan orientasi moral. Negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil perlu berkolaborasi dalam membangun *ecosystem of moderation* ekosistem kebangsaan yang menumbuhkan budaya dialog, refleksi kritis, dan empati sosial sebagai implementasi konkret dari cita-cita *Islam Kebangsaan Inklusif*. Dengan demikian, reorientasi wacana kebangsaan di Indonesia bukan hanya tentang menjaga harmoni dalam keragaman, tetapi juga tentang menghadirkan model peradaban baru yang berkeadilan sosial, berdaya saing global, dan berakar kuat pada nilai-nilai spiritualitas Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

References

- Affan, M. (2021). Globalisasi dan Masa Depan Studi Agama (Islam): Antara Tantangan dan Peluang. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 151–180. <https://doi.org/10.32533/05202.2021>
- Alfanny, M. S., & Sirojuddin, A. S. (2025). Islam Indonesia Pluralitas Aliran Dan Paradigma Normatif-Historis. *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 292–304. <https://doi.org/10.71242/3dtx3956>
- Alfanny, M. S., Yusuf, K., Himmati, A., & Amien, A. B. (2025). Konsep Pluralitas di Indonesia: Menelisik Relasi Islam Rahmat Li Al-Ālamīn dan Bhinneka Tunggal Ika. *Mozaic: Islamic Studies Journal*, 4(01), 31–44. <https://doi.org/10.35719/mozaic.v4i01.2296>
- Annisa Rahmah, Fatimah Zahara, Ika Permata Bunda, & Gusmaneli Gusmaneli. (2024). Metode Pendidikan Islam Perspektif Islam. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 212–220. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.193>
- Aryani, L. A., Silpi, E., & Sari, H. P. (2025). Globalisasi dan Transformasi Pendidikan Islam: Menyongsong Era Digital. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 426–434. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.931>
- Faiqah, N., & Pransiska, T. (2018). Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(1), 33. <https://doi.org/10.24014/af.v17i1.5212>

- Khoirunnisa, K. (2023). Pemilu dan Politik Identitas: Dilema Antara Kebangsaan Dan Keagamaan. *JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 9(1), 36–54. <https://doi.org/10.52447/polinter.v9i1.6999>
- Kusuma, A. J., Rahmawati, R., & Fathun, L. O. M. (2022). Model Islam Inklusif Di Indonesia Sebagai Kajian Kritik Terhadap Teori “Clash Of Civilizations” Samuel P. Huntington. *Journal of Political Issues*, 3(2), 62–76. <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.71>
- Laudya, D. S., Siahaan, P. G., Purba, N. R., Giawa, R. F. A., Manurung, R. C., Putri, F. Y., Nasution, I. M., & Saragih, Y. B. (2025). Dampak Polarisasi Media Sosial Terhadap Hak Kelompok Minoritas Dalam Menyampaikan Pendapat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1544–1550. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.705>
- Lexy, M. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Cet.40). Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Nur Ilham, Darussalam Syamsuddin, & Syahrir Karim. (2024). Telaah Pemikiran Nurcholish Madjid Terhadap Politik Identitas. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 16(2), 261–277. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i2.1546>
- Muvid, M. B. (2025). Nasionalisme dan Agama: Merajut Bingkai Kebangsaan berbasis Spiritual. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16478651>
- Salman Shiddiq & Misra Misra. (2025). Teori Filter Bubble dan Echo Chamber: Dampak Transformasi Digital Terhadap Pendidikan Islam. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4(1), 122–130. <https://doi.org/10.55606/concept.v4i1.1824>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur`an* (Vol. 15). Lentera Hati.
- Sumarto, S. (2021). Membangun Konsep Diri Pancasila: Karakter Kebangsaan dan Pedoman Kehidupan. *Jurnal Literasiologi*, 6(2). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v6i2.262>
- Supandi, M. D., & Puspitasari, N. S. (2024). Political Polarization and Traditional Folktales: Examining Conflicts in the Legend of Mirah-Golan. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 19(2), 125–134. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v19i2.5841>
- Syaputra, D., & Marza, I. (2025). Membumikan Pluralisme dalam Pendidikan Islam: Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid. *NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 12(1), 139–161. <https://doi.org/10.51311/nuris.v12i1.1013>
- Toha, M., & Muna, F. (2022). Moderasi Islam Dan Aliran Pemikiran Pluralisme Agama. *Journal of Education and Religious Studies*, 2(01), 22–28. <https://doi.org/10.57060/jers.v2i01.36>
- Zafrilla, P. J. P. (2022). El tribalismo digital, entre la furia y la farsa: Pinchemos la burbuja de la polarización artificial en internet. *Opinião Pública*, 28(1), 33–61. <https://doi.org/10.1590/1807-0191202228133>